

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

*Framing* dalam konteks berita adalah suatu proses di mana media memilih serta menyusun informasi yang akan diberikan kepada masyarakat dengan tujuan membentuk pandangan dan pemahaman tertentu mengenai suatu peristiwa atau isu. *Framing* merupakan suatu strategi yang diterapkan oleh media untuk mengarahkan perhatian dan penafsiran *audiens* terhadap suatu topik dengan cara menekankan aspek-aspek tertentu dan mengabaikan atau mengurangi relevansi dari aspek lainnya.

Peneliti akan mengulas mengenai kesimpulan dari temuan 23 judul berita terkait netralitas ASN yang sudah dianalisis sebelumnya menggunakan dua dimensi utama yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu, empat elemen *framing* Robert N Entman dan *framing* moral yang diberikan oleh rri.co.id.

5.1.1 Pemberitaan rri.co.id mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2024 memberikan analisis mendalam terhadap dua dimensi framing oleh Robert N Entman. Fokus pada himbauan kepada ASN untuk tetap netral mencerminkan kesadaran akan peran penting ASN sebagai aparatur negara. Pemberitaan juga menyoroti upaya konkret dari Bawaslu dan KASN, termasuk pembacaan ikrar netralitas di beberapa wilayah. Langkah-langkah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi netralitas ASN menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga keberlangsungan pemilu yang adil dan transparan. Ini mencerminkan upaya bersama untuk memastikan keberhasilan dan integritas Pemilu 2024.

5.1.2 Pendefinisian masalah atau *define problems* dalam pemberitaan mengenai kasus netralitas ASN pada Pemilu 2024. Pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024 disoroti oleh rri.co.id sebagai pendefinisian masalah, yang menekankan bahwa sikap netral ASN memiliki dampak signifikan terhadap

keselamatan demokrasi dan kelancaran jalannya proses pemilihan yang adil. Fokus permasalahan yang dijelaskan adalah upaya memastikan bahwa ASN tetap berkomitmen untuk mempertahankan netralitasnya selama Pemilu 2024.

- 5.1.3 rri.co.id menyoroti faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya himbuan netralitas ASN pada Pemilu 2024 menggunakan analisis *diagnose causes*. rri.co.id mengangkat isu potensi keberpihakan ASN dalam Pemilu 2024, menyoroti kemungkinan terjadinya kecenderungan mendukung pihak tertentu dalam proses pemilihan. Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa ASN, yang seharusnya berperan sebagai pelayan publik dengan menjaga netralitasnya, terlibat dalam aktivitas politik praktis. Keberpihakan ini dipandang masih menjadi isu serius di berbagai daerah, dan oleh karena itu, perlunya pengawasan terus-menerus terhadap netralitas ASN guna memastikan integritas demokrasi tetap terjaga.
- 5.1.4 rri.co.id membuat keputusan moral dalam pemberitaan terkait dengan netralitas ASN pada Pemilu 2024 menggunakan elemen *framing make moral judgement*. rri.co.id memberikan penilaian moral dengan menyebutnya sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma moral dan etika yang seharusnya dipegang oleh para pelayan publik. Hal ini disebabkan oleh kemampuan ASN untuk menggunakan kekuatan atau posisi mereka guna mencapai tujuan politik pribadi atau kelompok.
- 5.1.5 rri.co.id menekankan pada solusi penyelesaian masalah dalam pemberitaan ini dengan menggunakan elemen *framing treatment recommendation*. rri.co.id melibatkan pengawasan serta memberikan sanksi yang sesuai bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas selama Pemilu 2024. Penerapan pelaporan melalui media sosial sebagai bentuk pengawasan dimana masyarakat dapat ikut andil melakukan pengawasan. Selain itu ada pula sanksi administratif dianggap sebagai suatu mekanisme yang dapat

mendorong pertanggungjawaban ASN terhadap pelanggaran netralitas.

- 5.1.6 pemberitaan rri.co.id mengenai netralitas ASN dalam Pemilu 2024 menekankan framing moral sebagai fokus utama. Berfokus pada tanggung jawab moral ASN sebagai pelayan publik, pemberitaan menyoroti pentingnya sikap netralitas dalam mempertahankan integritas dan kepercayaan masyarakat. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa framing moral menjadi kunci dalam menyampaikan pesan mengenai netralitas ASN, menegaskan peran moralitas dalam menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepercayaan publik.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Terkait dengan pemberitaan netralitas ASN, saran ini menekankan untuk Memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif kepada ASN tentang pentingnya netralitas dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini dapat membantu mencegah kecenderungan terlibat dalam politik praktis yang dapat merugikan integritas demokrasi.
- 5.2.2 Memastikan bahwa sanksi administratif yang diberikan kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas bersifat konsisten dan tegas. Hal ini dapat lebih efektif dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran netralitas tidak akan ditoleransi.